





**Sugeng Enjang**  
**Pak Wali**

Rubrik Dialog Walikota Yogyakarta dengan Warga

### Juru Parkir Wakil Pemkot

*Salam kenal, Pak Wali. Saya perantau yang kuliah di Jogja dan kemudian dapat pekerjaan di Jogja pula. Senang bisa tinggal di Jogja dan jadi bagian dari warga Jogja. Tapi, kalau masalah parkir, kadang-kadang bikin mangkel, Pak. Tulisan di karcis Rp 500, dicap sendiri Rp 1.000. Kalau nggak, dicap "helm Rp 500" sehingga jadi Rp 1.000. Denger-denger, tarif resmi naik jadi Rp 1.000, ya. Jadinya sempat saya ditarik parkir Rp 2.000. Awalnya pakai adu mulut, tapi lama-lama capai kalau harus berulang kali. Akhirnya pasrah saja, meskipun nggak terima. Nominatnya memang kecil, Pak, tapi ini kan masalah hak konsumen dan kepatuhan pada aturan. Mohon perhatian, Pak Wali.*

*Vera Anastasia - Semaki, Umbulharjo*

Salam kenal juga, Mbak Vera. Terima kasih sudah menjadi bagian dari warga Jogja dan merasa senang tinggal di Jogja. Mari kita terus benahi Jogja bersama-sama, biar Jogja tambah nyaman bagi warganya sendiri maupun para tamu.

Jogja memang punya aturan baru soal parkir, termasuk tarifnya. Semuanya tertuang dalam Perda perpajakan yang baru 2 hari lalu disahkan. Dengan adanya Perda baru, mudah-mudahan kita bisa menata bersama masalah

perparkiran. Terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kenyamanan untuk pengguna jasa parkir, sekaligus kepastian hukumnya.

Persoalan yang dikeluhkan masyarakat mengenai layanan parkir di Jogja, sebetulnya merupakan persoalan ikutan yang bersumber dari permasalahan yang lebih mendasar tentang perpajakan. Permasalahan mendasar itu terutama menyangkut pemahaman juru parkir terhadap sifat kemitraan antara Pemkot selaku penyelenggara parkir dengan juru parkir sebagai petugas yang melayani jasa parkir kepada masyarakat di lapangan.

Khusus mengenai masalah itu, kita punya pekerjaan bagaimana agar juru parkir mampu dilibatkan sebagai mitra untuk melayani masyarakat memperoleh jasa parkir secara optimal. Bagaimana para juru parkir memahami bahwa mereka adalah wakil Pemkot untuk melayani masyarakat di bidang perpajakan.

Setelah Jogja punya Perda perpajakan yang baru, persoalan paling berat adalah sosialisasi kepada juru parkir. Bukan sekadar sosialisasi kita sudah punya Perda baru, tarif parkir baru, dan aturan lain yang baru. Melainkan sosialisasi agar para juru parkir mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab mengurus parkir sebagai wakil Pemkot. Juru parkir mestinya memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat, sebagai pemerintah dan atas nama pemerintah.

Komitmen yang lebih konkret adalah juru parkir melayani masyarakat dengan kepastian tarif, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Kalau komitmen itu sudah bisa dihayati, saya kira keluhan-keluhan masyarakat, termasuk persoalan yang dihadapi Mbak Vera, tidak akan muncul lagi. Karena juru parkir bertugas dengan berlandaskan semangat melayani masyarakat. \*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Perpajakan			

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005